

# Aset Tanpa Sertifikat

**PONTIANAK** - Berdasarkan hasil pemeriksaan atas manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BPK memperoleh banyak temuan. Meski demikian, BPK tetap mengemukakan jempol terhadap

• ke halaman 15 kolom 2



## Temuan BPK Hasil Pemeriksaan Manajemen Aset Pemrov Kalbar

### Temuan yang nilainya belum dapat diukur:

- ▶ Perjanjian pemanfaatan aset dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan
- ▶ Beberapa mitra kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) belum dikenakan retribusi



### Temuan lain yang menonjol :

- ▶ Barang milik daerah senilai Rp1,952 miliar tidak diketahui keberadaannya
- ▶ Aset hibah pemerintah pusat senilai Rp3,8 miliar tidak jelas statusnya
- ▶ Penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan Rp2,9 miliar
- ▶ Tanah pemrov dikuasai pihak ketiga senilai Rp917 juta
- ▶ Tanah pemrov belum bersertifikat senilai Rp79,9 miliar

Sumber: BPK RI

GRAFIS : SIGIT/PONTIANAKPOST

## Aset Tanpa Sertifikat

Sambungan dari halaman 9

pemprov. Sebab, menurut Anggota BPK Rizal Djajil, Pemprov Kalbar telah memiliki komitmen besar dalam membenahi aset. Komitmen itu ditandai dengan dilakukannya pemeriksaan aset.

"Di seluruh Indonesia, Kalbar adalah satu-satunya daerah yang melakukan pemeriksaan seperti ini. Dengan ini, Kalbar menjadi satu-satunya provinsi yang telah punya daftar aset jelas, posisinya jelas, masalahnya jelas dan action-nya jelas," kata Rizal usai sidang paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen aset pemprov, Kamis (3/11) di DPRD.

Dalam sidang paripurna itu, hasil pemeriksaan diserahkan kepada Ketua DPRD, Minsin dan Gubernur, Cornelis. Menurut Rizal, dengan adanya pemeriksaan tujuan tertentu yang difokuskan pada manajemen aset ini, sekarang pemprov telah memiliki data tentang aset yang sangat lengkap. Pemprov hanya perlu menindaklanjuti beberapa rekomendasi BPK guna membenahi temuan-temuan.

Ia berharap, setelah adanya audit aset dan perbaikan-perbaikan, opini BPK atas laporan keuangan pemprov di masa datang dapat meningkat dari tahun lalu. "Saya tidak mau takabur menyampaikan WTP (wajar tanpa pengecualian). Tetapi kita berharap, *we hope so WTP*," ujarnya. Sekadar catatan, di tahun lalu, opini yang berhasil diraih pemprov adalah WDP (wajar dengan pengecualian).

Dari hasil pemeriksaannya, BPK mengungkapkan 26 temuan pemeriksaan ditinjau dari aspek perolehan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan serta pemeliharaan maupun pemindahtanganan aset, di antaranya perjanjian pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang dinilai lemah dan belum menguntungkan pemprov.

Kerjasama itu misalnya antara pemprov dengan PT CPM terkait pemanfaatan lahan eks hak pakai KONI di Jalan Ahmad Yani. Kerjasama tersebut belum mengatur besaran kontribusi yang harus diberikan PT CPM dan tim pengkaji tidak melakukan penelitian dan penilaian atas biaya clean and

clear tanah yang dikerjasamakan.

Selain itu, ditemukan pula adanya beberapa mitra kerjasama bangun serah guna (BOT) yang belum dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah, misalnya dengan PT NSI, Restoran SB dan rumah makan AU. Untuk masalah ini, BPK merekomendasikan adanya negosiasi tentang retribusi dengan pihak terkait.

Permasalahan menonjol lain yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah adanya aset senilai Rp1,9 miliar tidak diketahui keberadaannya. Aset itu berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp1,5 miliar, Dinas Pendidikan Rp409 juta serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp900 ribu.

Kemudian, terdapat aset hibah pemerintah pusat yang tidak jelas statusnya senilai Rp3,85 miliar. Aset tersebut yaitu peralatan dan mesin pada enam SKPD. Aset-aset ini statusnya dipertanyakan karena tidak memiliki dokumen pendukung.

Ada pula temuan tentang penggunaan dan pemanfaatan

aset yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,9 miliar.

Aset ini berupa peralatan dan mesin yang masih dikuasai mantan ketua/anggota DPRD, mantan gubernur dan mantan PNS di lingkungan pemprov, aset peralatan dan mesin di rumah jabatan ketua DPRD yang dikuasai pihak lain serta aset bangunan dan gedung pada rumah dinas jabatan DPRD yang ditempati oleh bukan penghuni yang sah. Bahkan, di antaranya disewakan tanpa persetujuan gubernur.

BPK juga menemukan adanya tanah pemprov yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp917 juta yaitu enam bidang tanah seluas 155.124 yang tersebar di Pontianak, Singkawang dan Bengkayang. Di samping itu, temuan lain yakni tentang tanah yang belum bersertifikat senilai Rp79,901 miliar.

Dari 893 bidang tanah yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2010, hanya 290 bidang tanah yang bersertifikat (603 belum bersertifikat). Malah, dari 290 bidang yang bersertifikat tersebut, sebanyak 144 bidang dengan luas 2.803.989 m<sup>2</sup> belum atas nama pemprov. Untuk penyelesaian masalah-masalah ini, BPK merekomendasikan agar pemprov dapat bekerjasama atau terus berkoordinasi dengan DPRD, BPK, BPKP, BPN dan pihak terkait lain.

Gubernur Cornelis menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh BPK. Pemprov akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini pada 2012. Paling tidak, kata Cornelis, dalam 2011, pemprov sudah harus punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk

menuntaskan masalah aset.

Ia meminta dukungan dari DPRD karena dalam upaya menuntaskan masalah aset dibutuhkan anggaran yang mencukupi dari APBD, misalnya untuk pembuatan sertifikat tanah.

"Tetapi yang jelas kita sudah cetak sejarah. Kita sudah mencatat harta kekayaan kita. Terima kasih kepada BPK, teman-teman di DPRD dan semua yang memberi dorongan kepada pemda untuk mencatat harta kekayaannya," ujar dia. Untuk aset-aset yang dikuasai pihak lain, menurutnya pemprov segera akan membicarakannya dengan pihak terkait. Begitu pula dengan masalah retribusi dari pemakaian aset oleh swasta yang masih rendah. "Kita akan hitung kembali. Kalau terlalu rendah, kita akan naikkan dikitlah," katanya. (ron/uni)